

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2013.
- _____. *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris dan PPAT (Kapita Selekta Notaris & PPAT, (1))*. Surabaya. Indonesia Notary Community (INC). 2016.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung. P.T. Alumni. 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Keempat. Yogyakarta. UII Press. 2016.
- Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*, Cet.4. Depok. PT RajaGrafindo Persada. 2019.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. 2014.
- Budiono, Herlien. *Beberapa Catatan Mengenai Perkumpulan Dalam Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2012.
- _____. *Demikian Akta Ini Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2018.
- Hariyani, Iswi, R.Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani. *Panduan Praktis SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum)*. Cetakan Pertama. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. 2011.
- HS, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cetakan Kedua. Jakarta. PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 2011.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

Nico. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta. Center for Documentation and Studies of Business Law (CDBL). 2003.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*. Jakarta. Dian Rakyat. 1985.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia II: Bentuk-bentuk Perusahaan (Cetakan ke-8)*. Jakarta. Djambatan. 1995.

Rido, R. Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung. Penerbit Alumni. 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Rajawali. 1984.

Sumardjono, Maria SW. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Bahan Kuliah. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. 2021.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur. PT. Balai Pustaka. 2014.

Syahnel, Anhar, Sulhan, Irwansyah Lubis. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta. Mitra Wacana Media. 2018.

B. Tesis/Artikel/Jurnal

Utariyani, Sisilia Cici. “Kedudukan Hukum Perkumpulan di Indonesia: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi”. *Tesis*. Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2017.

Rina. “Hambatan Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan”. *Tesis*. Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2015.

Algar, Muhammad. “Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum”. *Tesis*. Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2018.

Perkumpulan Berbadan Hukum. Materi Seminar Nasional “*Memahami Badan Hukum Perkumpulan dan Problematika Pengajuan Legalitasnya*”. disampaikan oleh Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM RI. Yogyakarta. 17 Oktober 2022.

Simatupang, Dian Puji, Eko Primananda, Wukir Ragi. “*Analisis Penerapan Sistem AHU Online Pada Ditjen AHU, Kemenkumham Republik Indonesia: Suatu Kajian Yuridis Normatif*”. Jurnal Meta-Yuridis. Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Volume (4) Nomor 1. Maret 2021.

Sultan, Aby. “*Ditjen AHU Ingin Manusia Terlibat Dalam Proses Verifikasi Sistem Online Badan Sosial Perkumpulan dan Yayasan*”. Jurnal Kumham. 8 Desember 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang *Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2016)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 660 Tahun 2019)

D. Internet

Panduan Perkumpulan- AHU Online, <https://panduan.ahu.go.id/>, diakses pada 20 Oktober 2022.

Yugi Hindarto, “Yasonna Bantah #2019PrabowoPresiden Terdaftar di Kemenkumham.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180910090126-32-329037/yasonna-bantah-2019prabowopresiden-terdaftar-di-kemenkumham>, diakses pada 21 Oktober 2022.